

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan batu bara sebagai bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Thailand dimulai pada tahun 1950-an di sebuah daerah bernama Mae Moh, Provinsi Lampang, Thailand Utara. Pada tahun 1960, generator pertama mulai beroperasi di lokasi tersebut. Namun kurang dari dua dekade PLTU tersebut telah memberikan dampak buruk terhadap masyarakat yakni debu batu bara dan bahan kimia beracun yang mencemari sungai. Hingga pada tahun 2015 Mahkamah Agung Thailand memutuskan bahwa perusahaan listrik negara atau Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) harus membayar ganti rugi atas penurunan kesehatan, fisik, dan mental sebesar 25 juta baht (Petchkaew, 2022). Isu PLTU batu bara ini juga terjadi di wilayah Thailand Selatan yakni Provinsi Krabi.

PLTU di Provinsi Krabi sudah menjadi permasalahan bagi masyarakat lokal sejak dulu. Di tahun 90-an, kesaksian oleh seorang nelayan bernama Mani Bootpheaw mengatakan bahwa ketika PLTU masih menggunakan lignit sebagai bahan baku, asap yang dihasilkan dari pembakaran dapat menutupi seluruh rumahnya dan merugikan keluarganya selama hampir satu tahun serta tidak dapat menggunakan air hujan dikarenakan hujan yang turun merupakan hujan asam (Sandford, 2014). Wacana pembangunan PLTU batu bara di Krabi dimulai pada tahun 2010, sesuai dengan pedoman Rencana Pengembangan Listrik Thailand

2010-2030, *Power Development Plan (PDP)* revisi ke-3. Krabi merupakan salah satu dari 12 provinsi di wilayah Thailand Selatan yang kaya akan hasil laut, menjadi tujuan wisata internasional yang populer, dan terdapat area yang terdaftar dalam perjanjian lahan basah atau Ramsar Convention on Wetlands tepatnya berlokasi di Muara Sungai Krabi. Proyek PLTU batu bara yang akan dibangun di Krabi berkapasitas 870 megawatt dan merupakan satu dari empat proyek PLTU batu bara di wilayah Thailand Selatan dengan total kapasitas 4.000 megawatt. Proyek ini dibangun dengan rasionalisasi besarnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi yang diperkirakan akan meningkat sekitar 150 megawatt per tahunnya hingga pada tahun 2018 (Wangmanaopituk & Charoenlarnnopparat, 2024, 2).

Keputusan Pemerintah Thailand terkait wacana proyek PLTU batu bara tersebut tentunya tidak luput dari perhatian aktor-aktor non negara khususnya organisasi non-pemerintah. Hal ini menjadikan keputusan tersebut sebagai fenomena internasional yang mana fenomena internasional sejatinya bersifat sangat luas dan kompleks. Aktor non negara yang bersifat sentral dalam politik internasional serta memiliki kemampuan untuk mengubah fakta yang bersifat empiris dan non material menjadi suatu isu internasional melalui advokasi yang dilakukan. Fokus dari aktor ini mampu menyoroti capaian aspek-aspek yang sifatnya material maupun nonmaterial (Yuliestiana, 2018). Dalam hal ini aktor-non pemerintah tersebut adalah organisasi non-pemerintah internasional yaitu Greenpeace Thailand.

Aktivitas penolakan terhadap PLTU batu bara tersebut dimulai pada tahun 2013, sekitar 500 penduduk Krabi melakukan aksi protes dengan mengenakan baju bertulisan “batu bara membunuh kita” dan “Nenek moyang kita membangun tanah ini, tetapi batu bara merusaknya”. Aksi protes ini dipicu kekhawatiran bahwa PLTU batu bara yang telah diwacanakan akan merusak kesehatan para penduduk Krabi (Legacy Phuket Gazzete, 2013). Di waktu yang bersamaan Greenpeace menggelar protes dramatis dengan bergantung di pinggir tebing Teluk Railay, Krabi sembari memegang spanduk bertuliskan “COAL IS NOT THE ANSWER” yang bertujuan untuk mengirim pesan kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengganti PLTU batu bara dengan energi bersih (Legacy Phuket Gazzete, 2013). Greenpeace Thailand juga melakukan kolaborasi dengan perwakilan perikanan lokal Krabi dengan melakukan survei bersama untuk membuat peta yang bertujuan untuk menunjukan sumber daya alam di Provinsi Krabi. Peta tersebut juga berisi lokasi proyek PLTU serta jalur impor dan pengangkutan batu bara dan dampak yang mungkin terjadi apabila PLTU tersebut dibangun. (Greenpeace Thailand, 2013).

Pada tahun 2018, Kementerian Energi Thailand bersama dengan jaringan aktivis menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik pembangunan PLTU batu bara di Provinsi Krabi. Terdapat empat poin dalam nota kesepahaman yang disampaikan oleh Siri Chirapongphan selaku Menteri Energi Thailand, antara lain:

1. EGAT Menarik Laporan Dampak Lingkungan dan Kesehatan Pembangkit Listrik Tenaga batu bara Thepa dan PLTU Krabi dari

Kantor Kebijakan dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam waktu 3 hari sejak tanggal penandatanganan.

2. Kementerian Energi akan menyiapkan laporan Penilaian Dampak Strategis untuk mempelajari apakah wilayah Krabi dan Thepha Apakah Provinsi Songkhla cocok untuk membangun PLTU batu bara yang akan diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh para pakar netral dan diterima oleh kedua belah pihak. Jika ternyata daerah tersebut tidak cocok untuk PLTU batu bara. Proyek pembangunan PLTU batu bara di kedua daerah tersebut harus dihentikan.
3. Jika laporan tersebut cocok untuk pembangunan PLTU batu bara. Dalam prosesnya, Laporan Dampak Lingkungan dan Kesehatan harus disiapkan oleh perantara yang dapat diterima bersama.
4. Kasus antara jaringan aktivis dan EGAT diselesaikan. Nota Kesepahaman ini merupakan model yang baik di mana pemerintah dan rakyat dapat menemukan solusi bersama (BBC, 2018).

Setelah berbagai upaya yang dilakukan bertahun-tahun serta banyaknya pihak yang pesimis akan penolakan pembangunan PLTU batu bara dikarenakan aktivis berhadapan langsung dengan pihak militer dan personil keamanan yang mengatur kegiatan seperti dengar pendapat publik dan penilaian dampak lingkungan. Empat tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2022 Provinsi Krabi dinyatakan bebas dari batu bara (Greenpeace Southeast Asia, 2022).

Perlawanan yang telah dilakukan bertahun-tahun, kolaborasi agar menyatukan kekuatan dan tujuan, dan konsistensi untuk terus menyuarakan penolakan pembangunan PLTU batu bara di Krabi terhadap pemerintah pada akhirnya menjadi sebuah kemenangan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk memberi gambaran upaya jaringan advokasi transnasional dalam permasalahan pembangunan PLTU batu bara di Krabi, Thailand melalui identifikasi upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Greenpeace Thailand dalam memperoleh kemenangan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan sebuah permasalahan yakni bagaimana upaya advokasi transnasional yang dilakukan oleh Greenpeace Thailand kepada Pemerintah Thailand atas pembangunan PLTU batu bara Krabi 2013-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagaimana diuraikan pada sub bab berikutnya.

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh *International Non-Governmental Organization* (INGO) yaitu Greenpeace Thailand terhadap isu pencemaran lingkungan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis upaya advokasi yang dilakukan Greenpeace Thailand dalam melakukan penolakan atas proyek pembangunan PLTU batu bara di Krabi oleh Pemerintah Thailand

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan akademis dan kegunaan praktis, sebagaimana diuraikan pada sub bab berikutnya.

1.4.1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penstudi Hubungan Internasional terkait upaya advokasi transnasional yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah internasional dalam suatu fenomena khususnya lingkungan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi para pemangku kebijakan seperti pemerintah yang apabila dalam kebijakannya dapat mencemarkan lingkungan. Serta bagi para aktivis, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat untuk menyuarakan isu lingkungan agar terhindar dari pencemaran.

1.5. *Literature Review*

Pada sub-bab ini penulis akan mencoba mengaitkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, keterkaitan dilihat dari advokasi transnasional yang

dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dan juga topik yang diteliti peneliti yakni, pencemaran lingkungan. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang ditemui serta ditelaah oleh penulis:

Penelitian pertama berjudul "The Strategies of Transnational Advocacy Networks: A Support to Anti-Fracking Movement In The United Kingdom (2013-2019)" oleh Amelinda Fairuz Azura & Silvia Dian Anggraeni pada tahun 2021. Penelitian ini membahas terkait strategi dan peran jaringan advokasi transnasional dalam mendukung gerakan *Anti-Fracking* yang terjadi di Inggris oleh INGO bernama Friends of the Earth serta menggunakan TAN dan Paradigma Konstruktivisme. Dalam penelitian ini untuk mempengaruhi kebijakan nasional melalui peran jaringan transnasional digunakan strategi-strategi TAN yakni Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Sedangkan Paradigma Konstruktivisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma dan gagasan dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Adapun hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan TAN dalam memicu tekanan eksternal kepada Pemerintah Inggris hingga Pemerintah Inggris akhirnya mendeklarasikan keputusan resmi mengenai larangan menyeluruh penerapan *fracking* di Inggris pada tahun 2019.

Penelitian kedua berjudul "Gerakan Transnasional dan Kebijakan : Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok" oleh Puti Prameswari pada tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai strategi kampanye advokasi untuk mengubah perilaku dan kebijakan aktor target yang dilakukan oleh Greenpeace dalam advokasi Detox Campaign on Fashion di

Tiongkok pada periode 2011-2013. Penggunaan strategi TAN dalam penelitian ini sama seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian terdahulu sebelumnya, serta juga didukung empat faktor utama yakni, pertama, kredibilitas Greenpeace sebagai NGO semakin berpengaruh dan diakui oleh masyarakat. Kedua, jejaring NGO lingkungan yang terjalin baik, kuat dan luas. Ketiga, kemampuan Greenpeace yang mendalam untuk mengolah informasi, pengetahuan, serta mobilisasi isu. Keempat, pemanfaatan media secara maksimal oleh Greenpeace. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengadvokasian yang dilakukan oleh Greenpeace berhasil tercapai terhadap dua target yaitu pelaku bisnis dan masyarakat transnasional namun terhadap pihak negara yaitu Tiongkok masih belum terlihat.

Penelitian ketiga berjudul “Pengaruh Jaringan Advokasi Greenpeace terhadap CIMB International dalam isu Pendanaan PLTU Batu Bara di Indonesia” milik Wildan Ilmanuarif Shafar & Nurul Isnaeni pada tahun 2022. Penelitian ini membahas terkait strategi TAN yang dilakukan oleh Greenpeace dalam kurun waktu 2010-2020 terhadap institusi keuangan yang memiliki nilai investasi terbesar dalam sektor batu bara di Asia Tenggara khususnya PLTU di Jawa yakni perusahaan CIMB. Aktivitas strategi TAN yang dilakukan oleh Greenpeace ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan pada tahun 2021 CIMB mengumumkan akan menghentikan pendanaan terhadap batu bara. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa TAN tidak hanya digunakan untuk melawan pemerintah saja melainkan mampu digunakan terhadap institusi/perusahaan keuangan.

Penelitian keempat berjudul “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International” oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan pada tahun 2020. Sama seperti penelitian terdahulu sebelumnya, aktivitas TAN yang dilakukan oleh Greenpeace ditujukan terhadap perusahaan yakni Wilmar International. Wilmar International sebagai pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 40% perdagangan global dan aktor pertama yang mempublikasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy (NDPE). Akan tetapi, karena tidak adanya implementasi dari kebijakan tersebut membuat Greenpeace menyoroti Wilmar international. Ketidakmampuan Greenpeace untuk mengubah arah kebijakan tersebut mendorong Greenpeace melakukan aktivitas TAN. Lemahnya strategi *Accountability politics* serta kesan eksklusif Greenpeace Indonesia menjadikan Greenpeace hanya mampu mengandalkan tekanan publik saja dalam menekan Wilmar International.

Penelitian kelima berjudul “Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015” oleh Yanuar Albertus pada tahun 2021. Aktivitas TAN yang dilakukan oleh Greenpeace ini ditujukan terhadap perusahaan industri energi yaitu Shell yang melakukan rencana pengeboran di Kutub Utara periode 2012-2015. Greenpeace dapat dikatakan berhasil dalam menggagalkan rencana tersebut dikarenakan Shell mengumumkan bahwa membatalkan rencana pengeboran pada 28 September 2015. Penelitian ini telah menunjukan bahwa aktivitas TAN tidak

hanya terjadi apabila institusi pemerintahan/swasta sedang menerapkan kebijakan yang mengakibatkan berlangsungnya kerusakan lingkungan, tetapi apabila hal tersebut masih menjadi rencana juga dapat digagalkan melalui TAN. Penelitian-penelitian terdahulu diatas merupakan contoh bagaimana strategi TAN dilakukan baik terhadap industri energi, industri keuangan, hingga pemerintah yang dilakukan oleh berbagai NGO/INGO.

Dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait advokasi transnasional dengan menggunakan TAN sebagai alat analisisnya, penulis menemukan belum adanya penelitian yang membahas terkait advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Thailand melalui tipologi taktik TAN dengan aktor target dari advokasinya adalah Pemerintah Thailand. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Thailand dalam melakukan penolakan atas pembangunan PLTU batu bara Krabi di Thailand.

1.6. Kerangka Pemikiran Konseptual

1.6.1. Transnational Advocacy Network (Jaringan Advokasi Transnasional)

Pada akhir abad ke-20, politik dunia makin banyak melibatkan aktor non-pemerintah yang saling berinteraksi satu sama lain, baik dengan negara maupun organisasi internasional. Interaksi yang terstruktur hingga membentuk suatu jaringan yang mengakibatkan jaringan ini makin terlihat dalam politik internasional. Salah satu jaringan yang terlibat adalah jaringan aktivis yang dilihat dari sisi sentralitas dan kualitas akan gagasan yang berprinsip serta nilai-nilai

dalam memotivasi pembentukan suatu jaringan advokasi transnasional. Advokasi didefinisikan ketika para advokat membela tujuan orang lain, kepentingan umum, dan proposisi, lebih dari itu juga untuk mempromosikan tujuan, ide-ide berprinsip, dan norma-norma, serta perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1998).

Transnational Advocacy Network (TAN) bersifat sangat penting baik dalam lingkup internasional maupun domestik, dengan membangun hubungan baru di antara para aktor dalam masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional, mereka memperbanyak saluran akses ke sistem internasional. TAN terus berkembang dan bertujuan untuk mengubah perilaku negara serta organisasi internasional. Aktor-aktor utama dalam jaringan advokasi dapat mencakup sebagai berikut: Organisasi penelitian dan organisasi non-pemerintah domestik maupun internasional, gerakan sosial lokal, yayasan, Media, Gereja, serikat pekerja, intelektual Organisasi pemerintah regional dan internasional, pihak eksekutif maupun legislatif. Organisasi non-pemerintah atau NGO merupakan aktor yang memiliki peran sentral dalam semua jaringan advokasi, hal ini ditunjukkan dengan memulai tindakan dan memberikan tekanan besar terhadap aktor yang kuat untuk mengambil posisi. NGO juga memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1998). Terdapat dua cara terkait bagaimana TAN bekerja, pertama adalah pola bumerang (*boomerang pattern*). Pola bumerang ini terjadi apabila aktivis khususnya NGO lokal tidak mendapat kesempatan politik seperti terblokirnya akses terhadap aktor target di dalam negeri dan mengharuskan untuk membangun hubungan dengan aktor transnasional di negara lain. Hal ini bertujuan untuk

melipatgandakan kekuatan agar dapat melancarkan serangan terhadap aktor target (Keck & Sikkink, 1998). Kedua, sebagaimana Keck & Sikkink menjelaskan terkait bagaimana *Transnational Advocacy Network* bekerja dalam tulisannya yang berjudul “*Transnational advocacy networks in international and regional politics*” (Keck & Sikkink, 1999). Bahwa jaringan transnasional mencari pengaruh di berbagai negara dengan cara yang sama seperti kelompok politik atau gerakan sosial lain dalam melakukan hal tersebut. Namun, dikarenakan kurangnya kekuatan maka harus menggunakan cara lain yaitu informasi, ide dan strategi untuk mengubah informasi dan konteks nilai di mana negara membuat kebijakan. Keck & Sikkink juga menjelaskan terkait tipologi taktik dalam TAN, yaitu:

- (a) *Information politics*
- (b) *Symbolic politics*
- (c) *Leverage politics*
- (d) *Accountability politics*

Dalam penelitian ini, tipologi taktik yang ada dalam *Transnational Advocacy Network* dirasa lebih sesuai untuk digunakan sebagai alat analisa dikarenakan *boomerang pattern* secara khusus digunakan apabila aktor advokasinya adalah NGO lokal dan seluruh akses untuk melakukan aktivitas politik diblokir oleh Pemerintah.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Advokasi

Keck & Sikkink (1998) mendefinisikan advokasi sebagai tindakan membela kepentingan orang lain atau membela suatu tujuan ataupun proposisi. Advokasi juga mencakup tindakan dalam mendukung tujuan, ide, prinsip, norma, serta perubahan kebijakan.

1.7.1.2. Tipologi Taktik *Transnational Advocacy Network*

Menurut Keck & Sikkink (1999), salah satu cara bagaimana TAN bekerja yaitu melalui empat tipologi taktik. Adapun penjelasan keempat tipologi taktik adalah sebagai berikut:

- (a) *Information politics*, kemampuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan secara politis dan mampu digerakkan dengan cepat serta kredibel terhadap pihak atau tempat yang paling terdampak manfaatnya.
- (b) *Symbolic politics*, kemampuan menyerukan simbol, tindakan, atau cerita dari suatu situasi agar masyarakat sadar dan mengetahui isu yang diperjuangkan.
- (c) *Leverage politics*, kemampuan untuk menyerukan aktor-aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi dimana aktor jaringan yang lebih lemah memiliki kemungkinan yang lebih kecil sebagai pengaruh.

(d) *Accountability politics*, upaya-upaya untuk mewajibkan aktor yang lebih kuat mengambil tindakan seperti mengubah kebijakan atau prinsip atas suatu isu yang sedang diperjuangkan.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Advokasi

Upaya Greenpeace Thailand dan jaringannya dalam membela kepentingan masyarakat Krabi, menyuarakan penolakan atas pembangunan PLTU batu bara Krabi sehingga Pemerintah Thailand mengubah kebijakan tersebut dengan membatalkan proyek tersebut.

1.7.2.2. Tipologi Taktik *Transnational Advocacy Network*

(a) Information politics

upaya-upaya Greenpeace Thailand dan jaringannya dalam membuat informasi seperti laporan dan kajian “Krabi at the Crossroads”, “Human Cost of Coal Power”, “Krabi Goes Green”, dan “The Unseen Krabi” serta penyebaran informasi yang dilakukan.

(b) Symbolic politics

upaya-upaya Greenpeace Thailand dan jaringannya dalam melakukan aksi simbolik seperti membentangkan spanduk di Pantai Railay Krabi, kolaborasi dengan nelayan, dan protes di depan kantor Pemerintah Thailand, serta penggunaan tagar di sosial media.

(c) *Leverage politics*

upaya-upaya Greenpeace Thailand dalam mengajak aktor yang lebih kuat seperti PBB, WHO, dan Sekretariat Ramsar dalam memberikan tekanan kepada Pemerintah Thailand.

(d) *Accountability politics*

upaya-upaya Greenpeace Thailand dalam mewajibkan aktor target yaitu Pemerintah Thailand hingga membatalkan proyek PLTU batubara Krabi.

1.8. Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwa Greenpeace Thailand selaku aktor jaringan advokasi transnasional melakukan upaya-upaya advokasi untuk menggagalkan Pemerintah Thailand dalam proyek pembangunan PLTU batu bara Krabi. Melalui keempat taktik TAN yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, Greenpeace Thailand dapat memanfaatkan jaringannya untuk menekan Pemerintah Thailand sehingga proyek tersebut pada akhirnya dibatalkan.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Tipe deskriptif juga bertujuan dalam mendeskripsikan suatu populasi situasi, ataupun fenomena secara akurat dan sistematis (Fiantika et al., 2022, 88)

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dalam penelitian ini berlokasi di Thailand.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini utamanya adalah Greenpeace Thailand namun tidak menutup kemungkinan melibatkan jaringan lainnya seperti NGO, masyarakat lokal, dan organisasi internasional

1.9.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat data deskriptif. Data deskriptif sendiri merupakan jenis data yang berbentuk kata-kata, gambar, objek, dan bukan dalam bentuk angka (Bakry, 2016, 19).

1.9.5. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam melakukan penelitian ini. Sumber primer dan sumber sekunder, sumber primer merupakan sumber yang *langsung memberikan* data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan

sumber yang *tidak langsung* memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013, 137).

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang berasal dari wawancara kepada perwakilan Greenpeace Thailand, yakni Chariya Senpong selaku Ketua Tim Transisi Energi via daring dan untuk data sekunder yang dikumpulkan berasal dari jurnal ilmiah, website resmi instansi terkait, laporan dari instansi terkait, buku, laman berita dan dokumen yang kredibel.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu usaha dari seorang peneliti untuk meringkas data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data tertentu. Setelah melakukan proses analisis data dilanjutkan dengan interpretasi data, interpretasi data merupakan upaya seorang peneliti untuk mendapatkan makna atas data yang telah dianalisis. Interpretasi data juga mengacu pada kesimpulan dari fakta yang dikumpulkan setelah dianalisis (Bakry, 2016, 214-215).